

Aung San Suu Kyi Hadapi Empat Tuduhan Korupsi Baru

YANGON(IM)- Penasihat Negara Myanmar sekaligus Ketua Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi menghadapi tambahan empat tuduhan korupsi yang baru-baru ini diajukan di Pengadilan Tinggi Wilayah Mandalay.

Menurut salah satu anggota kuasa hukumnya, Min Min Soe, dua kasus baru menjerat Suu Kyi sendiri. Sementara, dua kasus lainnya diajukan terhadap Suu Kyi dan sejumlah politisi Partai NLD.

Para pengacara tidak diberitahu pada tanggal berapa kasus-kasus tersebut diajukan.

"Hanya setelah kami menyerahkan surat kuasa, kami baru akan mengetahui detail kasusnya. Kami akan tahu siapa yang terlibat pada saat itu," kata Min Min Soe dikutip dari media lokal Myanmar Now, Rabu (14/7).

Min Min Soe mengungkapkan Suu Kyi berencana memberikan surat kuasa kepada tim hukumnya pada Senin. Sidang pertama untuk kasus-kasus baru ini dijadwalkan digelar pada 22 Juli di Pengadilan Tinggi Wilayah Mandalay.

Suu Kyi yang ditangkap tak lama sebelum kudeta militer pada 1 Februari sudah menghadapi tujuh kasus. Rinciannya, enam kasus diajukan oleh junta dan satu kasus lain oleh warga sipil dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Penanggulangan Bencana Alam.

Sebelumnya, pada 9 Juni lalu, junta Myanmar mengumumkan mereka menjerat Suu Kyi atas pelanggaran korupsi yang serius dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara jika terbukti. Suu Kyi dituduh menerima uang senilai 600.000 dolar AS atau setara dengan Rp 8,5 miliar dan sekitar 11,4 kilogram emas dari mantan Kepala Menteri Wilayah Yangon Phyo Min Thein.

Menurut tim Komisi Anti-Korupsi di bawah junta, suap itu diberikan dalam tiga kesempatan berbeda sebagai imbalan atas dukungan dan perlindungan terhadap bisnis milik Phyo Min Thein. Akan tetapi, Phyo Min Thein belum diadili.

Menurut salah satu anggota kuasa hukum Suu Kyi, Phyo Min Thein kemungkinan tampil sebagai saksi pemerintah atau saksi penuntut dalam kasus terhadap Suu Kyi. Myanmar diguncang kudeta militer pada 1 Februari dengan menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi.

Militer berdalih pemilu yang mengantarkan Suu Kyi terpilih dengan suara terbanyak penuh kecurangan. Hingga 12 Juli, kelompok masyarakat sipil mencatat korban tewas sejak kudeta militer Myanmar mencapai 902 orang. ● gul



PERTEMUAN WAPRES AS DAN ANGGOTA DEMOKRAT

Wakil Presiden AS Kamala Harris bertemu dengan anggota Demokrat dari legislatif negara bagian Texas yang melarikan diri dari negara bagian dalam upaya untuk memperlambat perubahan undang-undang pemilu dan akses pemilih, di Washington, AS, Selasa (13/7).

India Terancam Covid-19 Gelombang Ketiga

Maraknya pertemuan tatap muka masyarakat India menjadi penyebab potensi besar gelombang ketiga Covid di negara tersebut.

INDIA(IM)- Sebuah organisasi dokter di India telah memperingatkan bahwa gelombang ketiga Covid-19 di negara itu tidak dapat dihindari karena pembatasan sosial yang dilonggarkan di seluruh negeri.

Perdana Menteri Narendra Modi juga telah memperingatkan terhadap kerumunan pengunjung di lokasi-lokasi wisata di India.

Foto dan video turis yang berbondong-bondong ke tujuan wisata populer menjadi viral dalam beberapa hari terakhir.

Video menunjukkan sebagian besar dari mereka tidak mengenakan masker atau menjaga jarak sosial di tempat

umum.

Laporan dari media-media setempat mengungkapkan ribuan orang kini kembali mengunjungi tempat-tempat wisata perbukitan (hill station) di India, sehingga memicu kekhawatiran penyebaran virus.

"Saya mengatakan dengan sangat tegas bahwa tidak baik sampai terjadi kerumunan di tempat-tempat wisata, pasar, tanpa pakai masker," kata Modi dalam cuitan di Twitter. Dia menyadari bahwa industri pariwisata telah mengalami pukulan hebat akibat pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown.

Kasus baru harian di India telah turun menjadi lebih dari

40.000 dalam beberapa pekan terakhir, turun dari puncaknya, yakni sekitar 400.000 kasus pada bulan Mei.

Penurunan jumlah sebagian besar disebabkan oleh lockdown ketat di sejumlah negara bagian, tapi kebijakan itu sekarang dilonggarkan.

Meski demikian, para ahli khawatir India dapat berada pada risiko gelombang infeksi ketiga karena baru sekitar 6% dari populasi yang memenuhi syarat yang telah divaksinasi sepenuhnya.

Sementara itu, baru sekitar 22% yang telah menerima setidaknya satu dosis.

Asosiasi Kedokteran India (IMA), sebuah organisasi yang mewakili dokter di India, pada Selasa (13/7) mengatakan "rasanya menyakitkan untuk mencatat bahwa baik pemerintah dan masyarakat sudah berpuas diri dan mengadakan pertemuan massal tanpa mengikuti protokol Covid".

"Kegiatan turis, travel ziarah, semangat keagamaan semuanya dibutuhkan, tapi bisa menunggu beberapa bulan lagi," kata IMA. Ia menambahkan bahwa membuka tujuan-tujuan ini dan membiarkan orang-orang yang tidak divaksinasi berkumpul dalam pertemuan besar adalah "super spreader yang potensial untuk gelombang ketiga Covid".

India baru saja keluar dari gelombang kedua yang mematikan.

Kala itu, rumah sakit dan krematorium yang kewalahan dipenuhi dengan orang mati.

Saat ini, beberapa negara bagian telah dibuka dan mengizinkan kegiatan turisme dan pertemuan keagamaan.

Tetapi para ahli khawatir tentang dampak dari pertemuan-pertemuan ini.

Pada April lalu, jutaan orang berkumpul di kota Himalaya Haridwar untuk berpartisipasi dalam festival Kumbh Mela, bahkan ketika beberapa

kota bergulat dengan kekurangan oksigen dan langkanya tempat tidur di rumah sakit.

Beberapa orang - yang datang dari seluruh penjuru negeri - dinyatakan positif pada hari-hari berikutnya.

Sekarang, pihak berwenang di negara bagian Uttar Pradesh bersiap untuk mengadakan festival Kanwar Yatra tahunan mulai 25 Juli.

Para ahli mengatakan bahwa India perlu menegakkan protokol kesehatan secara ketat dan lebih mempercepat laju vaksinasi untuk menghindari gelombang ketiga.

India memvaksinasi sekitar empat juta orang setiap hari, tetapi perlu 8-9 juta vaksinasi per hari untuk mencapai target vaksinasi semua orang di atas usia 18 pada akhir tahun ini.

Beberapa negara bagian juga tak memiliki cukup vaksin. Pada Selasa (13/7), beberapa pusat vaksinasi publik di Delhi ditutup setelah mereka kehabisan vaksin. ● tom

Dituduh Curi Rambu Kereta Api di Rusia, Diplomat AS Dipulangkan

MOSKOW(IM)- Seorang diplomat Amerika Serikat (AS) dituduh membahayakan nyawa manusia dengan merusak dan mencuri rambu kereta api di persimpangan kereta api yang ramai.

"Kini diplomat itu telah meninggalkan Rusia untuk pulang ke AS untuk menghindari kemungkinan pengadilan kriminal," ungkap para pejabat di Moskow, dilansir RT.com.

Berbicara sebagai bagian dari wawancara dengan program berita yang disiarkan di YouTube pada Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia Maria Zakharova menjelaskan pemerintah Rusia telah mengeluarkan protes ke Washington atas insiden tersebut, yang terjadi musim semi lalu.

Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengumumkan sehari sebelumnya bahwa pihak berwenang memiliki bukti yang mengkonfirmasi bahwa seorang pegawai misi diplomatik AS di Moskow berada di balik pencurian sinyal penunjuk kereta api dari persimpangan di luar stasiun di Ostashkov, dekat kota Tver, Rusia Tengah.

Satu klip video, yang tersedia secara eksklusif untuk RT, menunjukkan pria yang diduga sebagai diplomat Amerika Serikat itu mematahkan indikator kereta.

Para pejabat mengatakan itu adalah bagian penting dari infrastruktur dan pemindahan rambu itu mengancam nyawa para penumpang kereta api.

Menurut Zakharova, Washington memutuskan memanggil kembali pegawai kedutaan

yang bersangkutan "karena akan diperlukan untuk menghilangkan kekebalan diplomatik" mengingat catatan resmi protes dari Moskow.

Dia menambahkan lembaga penegak hukum di negara itu juga telah mengeluarkan permintaan untuk menyelidiki insiden tersebut.

Alih-alih bekerja sama dengan penyelidikan, mereka hanya mengirimnya pulang," papar dia.

Sementara permintaan resmi untuk komentar di Kedutaan Besar Amerika Serikat tidak dijawab.

Stasiun berita NTV telah menyebut diplomat Amerika Serikat di jantung pertikaian itu bernama Parker Wilson, mengutip sumber anonim.

Seorang pengguna dengan nama yang sama memiliki portofolio besar foto-foto kereta api Rusia yang ada di situs website untuk para penggemar kereta api, termasuk foto nomor di Ostashkov, tempat insiden itu terjadi.

Zakharova sebelumnya membandingkan antara kasus itu dan "The Malefactor" oleh penulis drama Rusia Anton Chekhov, di mana seorang pria dituduh mencuri mur logam dari kereta api.

"Namun, untuk semua keingintahuan situasi, dan kesamaan plot dengan cerita, bahaya yang diekspos orang Amerika terhadap kehidupan dan keselamatan penumpang kereta sama sekali tidak lucu," papar Zakharova. ● gul

AS Siap Cabut Sanksi Terhadap Pemimpin Spiritual Tertinggi Iran Khamenei dan Raisi

TEHERAN(IM)- Amerika Serikat (AS) akan mencabut sanksi terhadap pemimpin spiritual tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan presiden terpilih Ebrahim Raisi jika perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia dihidupkan kembali.

AS juga akan menghapus Garda Revolusi Iran (IRGC) dari daftar kelompok teroris.

Hal itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran dalam laporan triwulanan kepada parlemen tentang perkembangan negosiasi perjanjian nuklir seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (14/7).

Menurut laporan kementerian luar negeri Iran, yang diterbitkan di situs webnya pada hari Senin, jika kesepakatan untuk menghidupkan kembali JCPOA tercapai di Wina, AS juga akan menghapus sanksi terhadap lebih dari

seribu individu dan entitas, termasuk semua bank dan lembaga keuangan.

Meski begitu, AS akan tetap memberlakukan sanksi bagi semua perusahaan asuransi, semua perusahaan dan penyulingan minyak dan petrokimia Iran serta Organisasi Energi Atom dan perusahaan afiliasi serta lembaga penelitiannya.

Sebagai imbalannya, Iran akan kembali mematuhi kesepakatan itu, tetapi hanya setelah pencabutan sanksi diverifikasi.

AS dan Iran telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung di Wina sejak April lalu untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015, yang secara resmi dinamai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). AS secara sepihak memutuskan keluar dari perjanjian itu di bawah mantan Presiden Donald Trump pada 2018.

Putaran terakhir pembicaraan berlangsung pada 20 Juni, dan belum jelas kapan pembicaraan itu akan dilakukan.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pada hari Senin bahwa Washington tidak akan memaksakan batas waktu untuk pembicaraan putaran ketujuh, menambahkan bahwa hanya Teheran yang dapat menentukan kapan pembicaraan akan dilanjutkan.

Khamenei, yang memiliki keputusan akhir atas urusan negara di Iran, mengatakan pada Februari bahwa Iran akan kembali ke komitmennya berdasarkan kesepakatan hanya setelah penghapusan semua sanksi dan "diverifikasi" oleh Teheran.

AS belum mengomentari laporan Kementerian Luar Negeri Iran. ● ans



PASCA PEMBUNYAN PRESIDEN JOVENEL MOISE

Seorang petugas Polisi Nasional Haiti menjaga jalan di lingkungan Petion-Ville hampir seminggu setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moise, di Port-au-Prince, Haiti, Selasa (13/7).

Jepang Tangkap Empat Staf Olimpiade Inggris dan AS karena Dugaan Penggunaan Kokain

ANKARA(IM)- Empat warga negara Amerika Serikat dan Inggris yang datang ke Jepang untuk Olimpiade Tokyo ditangkap atas dugaan penggunaan kokain. Keempatnya bekerja di sebuah perusahaan swasta yang menjalankan generator listrik dan ditempatkan di Jepang sebagai bagian pergelaran Olimpiade Tokyo 2020, dilansir dari Kyodo News.

Olimpiade dan Paralimpiade Musim Panas akan dimulai pada 23 Juli setelah ditunda dari tahun lalu karena pandemi Covid-19. Polisinasional Jepang

mengatakan penangkapan dilakukan pada 3 dan 5 Juli, namun, terdakwa membantah tuduhan tersebut.

Pihak berwenang melakukan penangkapan setelah salah satu dari empat tahanan masuk ke sebuah apartemen saat malam di malam hari.

Tersangka dilaporkan minum-minum di sebuah bar bersama tiga orang lainnya sebelum kejadian.

Tes narkoba pada keempat tersangka mengungkapkan bahwa mereka menggunakan kokain pada 3-4 Juli. ● ans



PEMUTARAN FILM TITANE

Sutradara Julia Ducournau dan pemeran Agathe Rousselle berpose di Festival Film Cannes ke-74 selama Pemutaran film "Titane" dalam kompetisi saat kedatangan di Red Carpet, Cannes, Perancis, Selasa (13/7).

Penahanan Politisi Oposisi Venezuela Dikecam

WASHINGTON(IM)- Amerika Serikat (AS) dan Inggris mengecam penangkapan politisi oposisi Venezuela Freddy Guevara. Sekutu pemimpin oposisi Juan Guaido itu didakwa atas pasal terorisme dan pengkhianatan usai ditahan di jalan tol di Caracas.

Negara-negara Barat mengukui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Ia menuduh pemerintah Presiden Nicolas Maduro mencurangi pemilihan umum 2018.

Pada Senin (12/7) lalu, kantor kejaksaan Venezuela mengatakan telah mengeluarkan surat penangkapan untuk Guevara. Ia dituduh 'memiliki hubungan dengan kelompok ekstremis dan paramiliter yang berasosiasi dengan pemerintah Kolombia'.

Penangkapannya terjadi saat pemimpin-pemimpin oposisi termasuk Guevara hendak menggelar negosiasi dengan pemerintah Maduro. AS dan Eropa menuduh Maduro melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi.

"Amerika Serikat dengan tegas mengecam penahanan tidak adil pada anggota Majelis

Nasional 2015 Freddy Guevara dan ancaman terhadap presiden sementara Juan Guaido di Venezuela," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, Rabu (14/7).

Washington memberlakukan banyak sanksi pada pemerintah Maduro pada tahun 2019 setelah sengketa pemilu 2018. Maduro dan sekutu-sekutunya mengatakan sanksi-sanksi itu melanggar hukum internasional.

Pihak berwenang Inggris turut mengecam penangkapan Guevara. London juga mengkritik pasukan keamanan Venezuela yang memaksa masuk ke gedung apartemen tempat Guaido tinggal.

"Inggris mengecam penangkapan Freddy Guevara dan intimidasi pada presiden sementara Venezuela Juan Guaido," cicit Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab di Twitter.

"Rezim tidak sah Maduro harus membebaskan Pak Guevara dan semua tahanan politik, pemilihan umum yang adil dan bebas satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis Venezuela," ujarnya. ● gul